



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**

## **Laporan Keuangan**

**Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2024**

**Jl. P Mandurorejo No. 84 A Kajen 51161  
Telp. (0285 ) 382 002 Fax (0285) 382 001**



# **KATA PENGANTAR**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kajen, 30 Juni 2024

Sekretaris



Bambang Yusmanto, SE, M.Si

NIP. 19691202 199703 1 00



# **DAFTAR ISI**

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33

# **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jl. Mandurorejo No. 84 A – KAJEN 51161  
Telp. ( 0285 ) 382002 Fax. (0285 ) 382001

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system ppengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kajen, 30 Juni 2024

Sekretaris



*Bambang Yusmanto*

BAMBANG YUSMANTO, SE, M.Si  
NIP. 19691202 199703 1 003

# **RINGKASAN / LAPORAN KEUANGAN**



Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode I Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp 62.384.824.228 atau mencapai 77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 80.877.027.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 12.720.615.646 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 12.227.469.667 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 439.145.979 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 3.200.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 195.615.723 dan Rp 12.524.999.923

**KOMISI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN**  
**BARANG MILIK NEGARA**



### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 67.321.822.251 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 67.287.528.860 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 67.287.528.860 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 67.287.528.860

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Semester I tahun 2024 pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 5.590.682.188 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 67.287.528.860 kemudian dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 74.221.846.595 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp 6.934.317.735

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



**LAPORAN  
REALISASI ANGGARAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024		% thd Ang	JUNI
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	34.293.391	0,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	34.293.391	0,00	-
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.3	2.646.090.000	1.485.119.492	56	1.421.438.708
Belanja Barang	B.4	78.230.937.000	60.899.704.736	78	40.321.318.000
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>80.877.027.000</b>	<b>62.384.824.228</b>	<b>77</b>	<b>1.361.636.256</b>



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076  
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01  
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN PEKALONGAN 657295

Tgl Data : 19/07/24 12:24 PM  
Tgl Cetak : 19/07/24 3:47 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	80,877,027,000	62,384,824,228	(18,492,202,772)	77	42,667,735,000	23,002,851,713	19,664,883,287	54
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :  
FINAL

Kajen, 19 Juli 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
SEKRETARIS  
  
BAMBANG YUSMANTO  
96912021997031003





# **NERACA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023**

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	137,515,000	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	137,165,000	-
Persediaan	C.3	-	-
Jumlah Aset Lancar		274,680,000	-
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.4	2,138,557,050	2,138,557,050
Gedung dan Bangunan	C.5	97,718,000	97,718,000
Peralatan dan Mesin Belum Register	C.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(1,722,018,165)	(1,722,018,165)
Aset Tetap lainnya	C.8	3,200,000	3,200,000
Jumlah Aset Tetap		517,456,885	517,456,885
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Lain-Lain	C.9	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(1,722,018,164)	(1,722,018,164)
Jumlah Aset Lainnya			
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>792,136,885</b>	<b>517,456,885</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	264,016,337	216,500
Uang Muka dari KPPN	C.12	137,515,000	
Utang yang Belum Ditagihkan		66,452,200	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		467,983,537	216,500
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>467,983,537</b>	<b>216,500</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : ( 657295 ) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM  
Tgl Cetak : 19/07/24 3:57 PM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	0	30,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	11,835,713,792	1,000,000,000	10,835,713,792	1,083.57
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	357,616,875	500,663,625	(143,046,750)	(28.57)
Persediaan	4,139,000	3,496,067,651	(3,491,928,651)	(99.88)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>12,227,469,667</b>	<b>4,996,731,276</b>	<b>7,230,738,391</b>	<b>144.71</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Peralatan dan Mesin	2,391,034,050	2,391,034,050	0	0.00
Gedung dan Bangunan	97,718,000	97,718,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,200,000	3,200,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,998,806,071)	(1,897,650,038)	(101,156,033)	5.33
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>493,145,979</b>	<b>594,302,012</b>	<b>(101,156,033)</b>	<b>(17.02)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>12,720,615,646</b>	<b>5,591,033,288</b>	<b>7,129,582,358</b>	<b>127.52</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	150,998,431	351,100	150,647,331	42,907.24
Uang Muka dari KPPN	30,000,000	0	30,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	14,617,292	0	14,617,292	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>195,615,723</b>	<b>351,100</b>	<b>195,264,623</b>	<b>55,615.10</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>195,615,723</b>	<b>351,100</b>	<b>195,264,623</b>	<b>55,615.10</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	12,524,999,923	5,590,682,188	6,934,317,735	124.03
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>12,524,999,923</b>	<b>5,590,682,188</b>	<b>6,934,317,735</b>	<b>124.03</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>12,524,999,923</b>	<b>5,590,682,188</b>	<b>6,934,317,735</b>	<b>124.03</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>12,720,615,646</b>	<b>5,591,033,288</b>	<b>7,129,582,358</b>	<b>127.52</b>

Keterangan :  
FINAL

Kajen, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA  
SEKRETARIS



BAMBANG YUSMANTO  
196912021997031003

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : ( 657295 ) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 4:00 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	62,384,824,228
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	34,293,391	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	34,293,391
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	432,826,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6,358	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	32,852,920	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	8,891,992	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	26,820,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,353,868	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	22,015,680	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	42,848,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,465,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	473,849,644	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	424,189,600	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,824,300	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	61,072,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	80,375,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,044,901,240	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	34,175,650,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16,906,695,883	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	624,493,451	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	38,999,451	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,075,761	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,104,300	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,950,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	212,704,750	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35,509,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142,149,800	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,351,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,369,315,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	208,817,800	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	370
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	20,284,000
<b>JUMLAH</b>			<b>62,439,401,989</b>	<b>62,439,401,989</b>

Keterangan :  
FINAL

Kajen, 19 Juli 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
SEKRETARIS



BAMBANG YUSMANTO  
196912021997031003

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
 SATUAN KERJA : ( 657295 ) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 19/07/24 12:24 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 3:58 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	24,146,592	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	12,584,567,200	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	773,000,000
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	357,616,875	0
0.0	117131	Bahan Baku	4,139,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,391,034,050	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	97,718,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,200,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,980,565,373
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	18,240,698
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	126,537,631
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	14,931,500
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	9,529,300
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	30,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Diseter	0	14,617,292
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	61,984,824,228
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	34,293,391	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	286,748,558
0.0	391111	Ekuitas	0	5,590,682,188
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	11,984,567,200
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	34,293,391
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	487,066,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	6,698	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	36,973,180	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	10,006,584	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	30,240,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,469,177	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	24,767,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	42,848,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	15,125,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	532,964,644	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	424,189,600	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	8,345,300	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,072,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	80,375,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,435,140,240	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	34,175,650,000	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
 SATUAN KERJA : ( 657295 ) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 19/07/24 12:24 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 3:58 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	16,976,433,883	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	38,999,451	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,075,761	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,753,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	143,046,750	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	6,150,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	212,704,750	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,889,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	180,890,300	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,201,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,369,315,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	214,258,800	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	99,853,126	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,302,907	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	4,660,708,660	0
<b>JUMLAH</b>			<b>82,848,537,359</b>	<b>82,848,537,359</b>

Keterangan :

FINAL

Kajen, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



BAMBANG YUSMANTO  
196912021997031003



# **LAPORAN OPERASIONAL**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.1	1.611.657.123	1.548.073.545
Beban Persediaan	D.2	4.660.708.660	-
Beban Barang dan Jasa	D.3	57.140.746.335	21.069.636.135
Beban Pemeliharaan	D.4	36.889.000	43.071.000
Beban Perjalanan Dinas	D.5	3.770.665.100	535.158.070
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat			
Beban Penyusutan dan Amortisasai	D.6	101.156.033	74.050.833
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>67.321.822.251</b>	<b>23.269.989.583</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>67.287.528.860</b>	<b>23.269.989.583</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.7	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
<b>JUMLAH PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>		-	-
<b>SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	152.716
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		-	152.716
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya		-	-
Beban penyesuaian Nilai Persediaan		-	-
Kerugian Persediaan Rusak/Usang		-	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	152.716
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>67.287.528.860</b>	<b>23.269.836.867</b>

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 30 JUNI 2024  
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
 SATUAN KERJA : ( 657295 ) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 19/07/24 12:24 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 3:49 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	34,293,391	0	34,293,391	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	34,293,391	0	34,293,391	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	34,293,391	0	34,293,391	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,611,657,123	1,548,073,545	63,583,578	4.107
Beban Persediaan	4,660,708,660	0	4,660,708,660	
Beban Barang dan Jasa	57,140,746,335	21,069,636,135	36,071,110,200	171.199
Beban Pemeliharaan	36,889,000	43,071,000	(6,182,000)	(14.353)
Beban Perjalanan Dinas	3,770,665,100	535,158,070	3,235,507,030	604.589
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 30 JUNI 2024  
 (DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH**  
**SATUAN KERJA : ( 657295 ) KPU KABUPATEN PEKALONGAN**

Tgl Data : 19/07/24 12:24 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 3:49 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	101,156,033	74,050,833	27,105,200	36.604
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>67,321,822,251</b>	<b>23,269,989,583</b>	<b>44,051,832,668</b>	<b>189.307</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(67,287,528,860)</b>	<b>(23,269,989,583)</b>	<b>(44,017,539,277)</b>	<b>189.16</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	152,716	(152,716)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	152,716	(152,716)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>152,716</b>	<b>(152,716)</b>	<b>(100)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(67,287,528,860)</b>	<b>(23,269,836,867)</b>	<b>(44,017,691,993)</b>	<b>189.162</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(67,287,528,860)</b>	<b>(23,269,836,867)</b>	<b>(44,017,691,993)</b>	<b>189.162</b>

Keterangan :  
FINAL

Kajen, 19 Juli 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
SEKRETARIS



BAMBANG YUSMANTO  
196912021997031003

**KOMISI**

**LAPORAN**

**PERUBAHAN EKUITAS**

**PEMILIHAN**

**UMUM**

**LIHAN**



#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	5.590.682.188	517.240.385
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(67.287.528.860)	(23.269.836.867)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR		-	216.500
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	74.221.846.595	23.002.698.997
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		6.934.317.735	(266.921.370)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>12.524.999.923</b>	<b>250.319.015</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum adalah meningkatnya Partisipasi dalam Pemilihan Tahun 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

1. Visi Komisi Pemilihan Umum  
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
2. Misi Komisi Pemilihan Umum
  - a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
  - b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
  - d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
  - e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
  - f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara

intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;

- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

### 3. Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum



*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## *Kebijakan Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

## *Pendapatan- LRA*

### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan

BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- 

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama Kali*

**(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2024 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2024 adalah merupakan implementasi yang pertama.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2024	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
A	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>		
	Penerimaan Dalam Negeri	-	-
	a. Penerimaan Perpajakan		
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
	Pendapatan Lain-lain	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	-	-
B	<b>Belanja</b>		
	Belanja Pegawai	2.646.090.000	1.485.119.492
	Belanja Barang	78.230.937.000	60.899.704.736
	Belanja Modal	0	0
	Pembayaran Bunga Utang		
	Subsidi		
	Hibah		
	Belanja Bantuan Sosial	-	-
	Belanja Lain-lain	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA ( B I + B II )</b>	<b>80.877.027.000</b>	<b>62.384.824.228</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp 0,-

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	-	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp 1.485.119.492

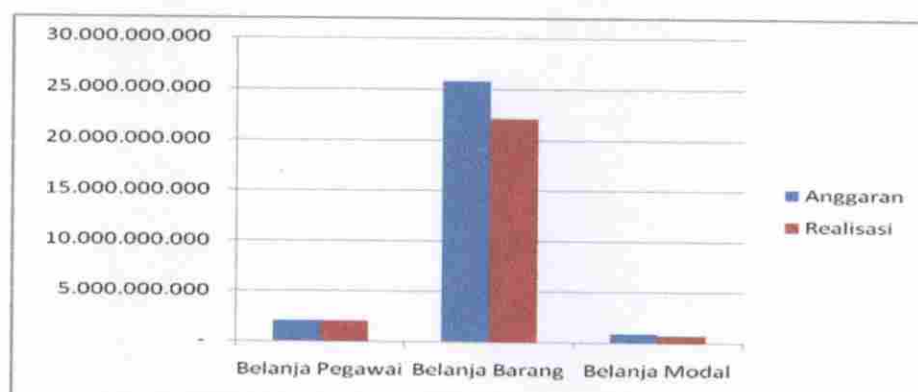
### B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp 23.002.851.713 atau 54.00% dari anggaran belanja sebesar Rp 42.667.735.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2024*

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.646.090.000	1.485.119.492	56
Belanja Barang	78.230.937.000	60.899.704.736	78
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>80.877.027.000</b>	<b>62.384.824.228</b>	<b>77</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>80.877.027.000</b>	<b>62.384.824.228</b>	<b>77</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja Semester I TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 98.15% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

*Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2024 dan 2023*

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2024	Reaisasil 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
<b>Rupiah Murni dan Pinjaman dari Hibah</b>			
Belanja Pegawai	1.485.119.492	1.421.438.708	4
Belanja Barang	60.899.704.736	21.581.413.005	182
Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>62.384.824.228</b>	<b>23.002.851.713</b>	<b>171</b>

*Belanja Pegawai*

**B.3 Belanja Pegawai**

Rp 1.485.119.492

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.485.119.492 dan Rp 1.421.438.708 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023*

URAIAN	Real 30 Juni 2024	Real 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.011.270.218	1.421.438.708	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.011.270.218</b>	<b>1.421.438.708</b>	
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.011.270.218</b>	<b>1.421.438.708</b>	

*Belanja Barang*

**B.4 Belanja Barang**

Rp

17.611.564.334

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 17.611.564.334 Rp 21.581.413.000

*Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023*

URAIAN	Real 30 JUNI 2024	Real 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	80.375.000	319.338.700	(74,83)
Belanja Barang Non Operasional	16.906.695.883	1.852.810.800	812,49
Belanja Jasa	-	84.780.027	(100,00)
Belanja Pemeliharaan	-	68.072.350	(100,00)
Belanja Perjalanan	17.611.564.334	28.000.000	62.798,44
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	624.493.451	48.378.500	1.190,85
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>35.223.128.668</b>	<b>2.401.380.377</b>	<b>1.366,79</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>35.223.128.668</b>	<b>2.401.380.377</b>	<b>1.366,79</b>

*Belanja Modal*

Rp 0,-

### B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan 0

#### Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	Real 30 JUNI 2023	Real 31 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	0	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0%
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	0%

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Di

Bendahara

Pengeluaran

Rp 30.000.000,-

#### C.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 30.000.000,- dan Rp 0'-

yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30-Jun-24	Tahun 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	-
Jumlah	137.616.000	-

Persediaan

Rp 4.139.000,-

#### C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 4.139.000,- dan Rp 3.496.067.651,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan

2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

Jenis	30-Jun-24	TH 2023
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Peralatan dan*

*Mesin*

*Rp 2.391.034.050*

*,-*

**C.3 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp 2.391.034.050,- dan Rp 2.391.034.050,-

*Gedung dan*

*Bangunan*

*Rp 97.718.000,-*

**C.4 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp 97.718.000,- dan Rp 97.718.000,-. Tidak ada mutasi nilai Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

Gedung berupa gudang yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Sertifikat Tanah NIB : 11.31.08.17.01582.

*Akumulasi*

*Penyusutan*

*Aset Tetap*

*Rp 1.998.806.071,-*

**C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 1.998.806.071,- dan Rp 1.897.650.038,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.391.034.050		
2	Gedung dan Bangunan	97.718.000		
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0		
4	Aset Tetap Lainnya	3.200.000		
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>2.491.952.050</b>		<b>0</b>

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 0,-*

**C.6 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 0,- dan Rp 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari KPPN Rp 30.000.000,-*

**C.7 Uang Muka Dari KPPN**

Saldo uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 30.000.000,- dan Rp 0,-. Akun ini merupakan penyeimbang kas di Bendahara Pengeluaran.

*Ekuitas Rp 12.524.999.923,-*

**C.8 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 12.524.999.923,- dan Rp 5.59.682.188,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### *Beban Pegawai* **D.1 Beban Pegawai**

*Rp 1.611.657.123,-*

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.611.657.123,- dan Rp 1.548.073.545,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### *Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN	30-Jun-24	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.485.119.862	1.421.438.708	
Jumlah	1.485.119.862	1.421.438.708	0,00%

### **D.2 Beban Persediaan**

*Beban  
Persediaan*

*Rp  
4.660.708.660,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 4.66.708.660,- dan Rp 0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

### *Beban Barang dan Jasa* **D.3 Beban Barang dan Jasa**

*Rp  
57.140.746.335,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 57.140.746.335,- dan Rp 21.069.636.135,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang

dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Beban*

*Pemeliharaan*

*Rp*

*36.889.000,-*

#### **D.4 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 36.889.000,- dan Rp 43.071.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban*

*Perjalanan*

*Dinas*

*Rp*

*3.770.665.100,-*

#### **D.5 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan dinas 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3.770.665.100,- dan Rp 535.158.070,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang*

*untuk*

*Diserahkan*

*kepada*

*Masyarakat*

*Rp0*

#### **D.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan melaksanakan misi KPU yaitu meningkatkan kualitas Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.

*Beban*

*Penyusutan dan*

*Amortisasi*

*Rp*

*101.156.033,-*

#### **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 101.156.033,- dan Rp 74,050,833,-

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional*  
*Rp 0,-*

#### **D.8 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas balance dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN	30-Jun-24	2023	NAIK (TURUN) %
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan aset non lancar	0	0	0,00
Beban Pelepasan asetnon lancar	0	0	0,00
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	152.716		152.716
Pendapatan dari keg non operasional lainnya	152.716	0	152.716
Beban dari keg non operasional lainnya	0	0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(162.716)</b>	<b>0</b>	<b>152.716</b>

### **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp*  
*5.590.682.188,-*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 5.590.682.188,- dan Rp 517,240.385-.

*Defisit LO*  
*Rp*  
*67.287.528.860,-*

#### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 67.287.528.860,- dan Rp 23.269.836.867,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai*

**E.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

*Aset Tetap Non  
Revaluasi  
Rp 0,-*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi pencatatan barang dari barang intrakomptable menjadi barang ekstrakomptable.

*Transaksi Antar  
Entitas*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

*Rp  
74,221,846,595,-*

Transaksi Antar entitas merupakan selisih kenaikan/penurunan ekuitas dengan surplus/ defisit LO.

*Ekuitas Akhir*

**E.5 Ekuitas Akhir**

*Rp  
12.524.999.923,-*

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 12.524.999.923,- dan Rp 250.319.015,-

**F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Pada Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan terjadi revisi DIPA sebagai berikut :

*Daftar revisi DIPA*

1. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 30 Januari 2024 (Revisi 1)
2. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 30 Januari 2024 (Revisi 2)
3. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 13 Februari 2024 (Revisi 3)
4. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 20 Februari 2024 (Revisi 4)
5. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 7 Maret 2024 (Revisi 5)
6. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 1

April 2024 (Revisi 6)

7. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 22 April 2024 (Revisi 7)
8. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 27 Mei 2024 (Revisi 8)
9. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 4 Juni 2024 (Revisi 9)
10. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 12 Juli 2024 (Revisi 10)
11. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024 Tanggal 15 Juli 2024 (Revisi 11)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 076 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
UNIT ORGANISASI : ( 01 ) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
SATUAN KERJA : ( 657295 ) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 19/07/24 3:50 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,590,682,188	517,240,385	5,073,441,803	980.87
SURPLUS/DEFISIT-LO	(67,287,528,860)	(23,269,836,867)	(44,017,691,993)	189.16
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	216,500	(216,500)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	216,500	(216,500)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	74,221,846,595	23,002,698,997	51,219,147,598	222.67
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	6,934,317,735	(266,921,370)	7,201,239,105	(2,697.89)
EKUITAS AKHIR	12,524,999,923	250,319,015	12,274,680,908	4,903.62

Keterangan :

FINAL

Kajen, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA  
SEKRETARIS

  
BAMBANG YUSMANTO  
196912021997031003



**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
PERIODE SEMESTER I 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK. 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK. 06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

13. Perdirjen Kekayaan Negara PER-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
14. PMK No. 01/PMK.06/2014 tentang Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, beserta lampirannya;
15. KMK RI No. 4/KMK.06/2014 perubahan atas Kepmenkeu No. 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat;
16. KMK No. 295/KMK.6/2019 tentang penggolongan masa manfaat dalam rangka penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat;
17. KMK RI No. 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, beserta lampirannya.
18. KMK RI No. 145/KM.6/2016 tentang Perubahan atas KMK RI No. 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat, beserta lampirannya.

#### **B. Entitas Pelaporan**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten.

KPU Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia.

KPU Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, serta koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota lain dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

#### **C. Periode Laporan**

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara ini berisi penjelasan mengenai Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024.

## **II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

### **A. Kodefikasi Barang Milik Negara**

- Kodefikasi barang adalah pemberian kode Barang Milik Negara sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara.
- Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab BMN.
- Sedangkan Kode Registrasi adalah kode yang diberikan pada setiap BMN yang terdiri dari kode lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan kode barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kodefikasi BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

### **B. Kapitalisasi Barang Milik Negara**

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Dasar penetapan kapitalisasi adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam SAP, Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknik SAP Nomor 9.

### **c. Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara**

Rekonsiliasi data BMN adalah proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi internal dilakukan setiap bulan pada tingkat satuan kerja dan setiap semester tingkat satuan kerja, wilayah, eselon I, dan Pengguna Barang. Rekonsiliasi internal pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan antara UAKPB dan KPKNL, UAPPB-W dan Kantor Wilayah

DJKN, UAPPB-E1 dan UAPB dengan Kantor Pusat DJKN. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga. Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009.

#### **D. Penyusutan Barang Milik Negara**

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tujuan Penyusutan adalah untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa : Gedung dan bangunan; Peralatan dan mesin; Jalan, irigasi, dan jaringan; dan Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.

### **III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Laporan Barang Pengguna Semester I 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPU Kabupaten Pekalongan, sebagai bagian dari laporan keuangan dan penyusunan laporan aset di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Semester I 2024 ini adalah sebesar Rp 2,522,800,950,00 (*Dua milyar*

*lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan Semester I 2024 sebesar Rp 2,522,800,950,00 (*Dua milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*), dan tidak terdapat nilai mutasi yang terjadi selama Semester I 2024.

Nilai mutasi BMN berasal dari transaksi keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
5. Laporan Penyusutan;
6. Laporan Barang Rusak Berat Yang Belum Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
7. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
8. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara;
9. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAIBA-SIMAK

#### **IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I 2024**

##### **1. Saldo Awal Laporan Semester I 2024**

Nilai BMN KPU Kabupaten Pekalongan Semester I 2024 adalah sebesar Rp 2.522.800.950,00 (*Dua milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 2.491.952.050,00 (*Dua milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.30.848.900,00 (*Tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah*).

##### **2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Semester I 2024**

Mutasi BMN Semester I 2024 adalah sebagai berikut:

###### **a. Barang Persediaan**

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 sebesar Rp 4,139,000,00 (Empat juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) jumlah tersebut merupakan saldo dari Surat Suara PSU DPRD sejumlah Rp. 3,925,000,00 ( Tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Surat Suara PSU PPWP sejumlah Rp. 214,000,00 (Dua ratus empat belas ribu rupiah)

###### **b. Tanah.**

KPU Kabupaten Pekalongan tidak memiliki asset tetap berupa tanah.

###### **c. Peralatan dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp 2,421,882,950.00 (*Dua milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*), jumlah tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp 2,421,882,950.00 (*Dua milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*), dan tidak

terdapat mutasi nilai Peralatan dan Mesin yang terjadi selama Semester I 2024.

Terdapat reklasifikasi barang namun tidak mempengaruhi nilai peralatan dan mesin.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan (3.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp 953.043.500,00 (*Sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut merupakan saldo awal total jumlah barang sebesar 14 unit dengan nilai sebesar Rp 953.043.500,00 (*Sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*). Tidak terdapat mutasi yang terjadi selama Semester I 2024.

Dari jumlah Alat Angkutan (3.02) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	14	953.043.500
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

2) Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Laporan Barang Kuasa Semester I 2024 adalah sebesar Rp 350.430.350,00 (*Tiga ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 166 buah dengan nilai Rp 350.430.350,00 (*Tiga ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*). Tidak terdapat mutasi nilai Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga.

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	248	350.430.350
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

3) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06),

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp 53.715.000,00 (*Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut merupakan saldo awal total jumlah barang sebesar 8 unit dengan nilai sebesar Rp 53.715.000,00 (*Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah barang, Komunikasi, dan Pemancar (3.06) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	12	53.715.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

4) Komputer (3.10)

Saldo Alat Komputer (3.10) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp 1.047.352.200,- (*Satu milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*). Jumlah tersebut merupakan saldo awal total jumlah barang sebesar 127 unit dengan nilai sebesar Rp 1.047.352.200,- (*Satu milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*). Tidak terdapat mutasi nilai.

Dari jumlah Alat Komputer (3.10) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	127	1.047.352.200
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

5) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Total Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp 1.980.565.373,00 (*Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

**d. Gedung dan Bangunan**

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp 97.718.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 97.718.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*), tidak terdapat mutasi pada Semester I 2024.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Gedung Bangunan (4.01)

Saldo Gedung Bangunan (4.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp 97.718.000,- (*Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	97.718.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Total Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp 18.240.698.00 (*Delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah*).

No. Akun	Uraian	Saldo Tahun Anggaran 2024		
		Nilai	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
4,01	Bangunan dan Gedung	97.718.000	18.240.698	79.477.302

**e. Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp 3.200.000,00 (*Tiga juta dua ratus ribu rupiah*) berupa 1 unit Maket TPS. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit barang dengan nilai sebesar Rp 3.200.000,00 (*Tiga juta dua ratus ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi nilai pada Aset Tetap Lainnya.

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	3.200.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

**f. Aset lain-lain**

Saldo Aset lain - lain pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp0,00.

**3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024**

**a. BMN per Akun Neraca**

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebesar Rp 2.147.475.050,00 (*Dua milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah*), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar	-	-	-	-	-	-
1	Persediaan	0	0,00%	0	0%	-	0,00%
	Sub Jumlah (1)	-	0,00%	0	0%	-	0,00%
II	Aset Tetap	2.491.952.050	1	30.848.900	1	2.522.800.950	1
1	Tanah	-	0,00%	0	0%	-	0,00%
2	Peralatan dan Mesin	2.391.034.050	95,95%	30.848.900	100%	2.421.882.950	96,00%
3	Gedung dan Bangunan	97.718.000	3,92%	0	0%	97.718.000	3,87%
4	Aset Tetap Lainnya	3.200.000	0,13%	0	0%	3.200.000	0,13%
	Sub Jumlah (2)	2.491.952.050	99,87%	30.848.900	100%	2.522.800.950	99,87%
III	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
1	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0	0,00%	0	0%	0	0,00%
	Sub Jumlah (3)	-	0,00%	-	0%	-	0,00%
	Total	2.491.952.050	100%	30.848.900	100%	2.522.800.950	100%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut.

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	1.980.565.373	99,09%	2.624.480	100%	1.983.189.853	99,09%
2	Gedung dan Bangunan	18.240.698	0,91%	0	0	18.240.698	0,91%
	Sub Jumlah (I)	1.998.806.071	100%	2.624.480	100%	2.001.430.551	100%
II	Aset Lainnya						
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0	0%	0	0%	-	0%
	Sub Jumlah (II)	-	0%	0%	0%	-	0%
	Total	1.998.806.071	100%	2.624.480	100%	2.001.430.551	100%

Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	4.139.000	4.139.000	-
2	Peralatan dan Mesin	2.391.034.050	2.391.034.050	-
3	Gedung dan Bangunan	97.718.000	97.718.000	-
4	Aset Tetap Lainnya	3.200.000	3.200.000	-

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

## V. INFORMASI BMN LAINNYA

### 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	Laporan Tahunan TA 2023	2.522.800.950		-
2	Laporan Semester 1 TA 2024	2.522.800.950	-	-

### 2. Informasi Pengelolaan BMN

#### a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I 2024 adalah sebagai berikut :

#### b. Pengelolaan BMN/*idle*

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Penanggungjawab UAKPB

Sekretaris



Bambang Yusmanto

NIP. 19691202 199703 1 003